

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dunia yang memberikan keterbukaan dalam melakukan investasi membuat banyak perusahaan membuka gerbang bagi investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut guna mengembangkan sayap serta memperkuat pijakan perusahaan dalam persaingan ekonomi global. Hal ini menuntut kinerja manajemen perusahaan untuk lebih transparan, baik dalam hal pengambilan kebijakan maupun pelaporan keuangan yang diungkapkan perusahaan (Soepriyadi 2011). Dalam kenyataannya tidak semua perusahaan mampu mengungkapkan informasi laporan keuangan yang memenuhi syarat-syarat laporan keuangan tahunan dengan baik, yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan dan transparan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya (Diyanti, 2010). Hal tersebut disebabkan kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang mengandung risiko dan ketidakpastian, oleh

Informasi yang disajikan perusahaan diharapkan dapat mengurangi

tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Pengungkapan (*disclosure*) yang memadai diperlukan untuk mempermudah informasi dipahami oleh para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tingkat kepatuhan perusahaan di Indonesia dalam melakukan pengungkapan laporan tahunan sesuai dengan peraturan yang ada masih tergolong rendah. Hasil penelitian Fitriany (1999) menemukan bahwa rata-rata indeks pengungkapan di Indonesia sebesar 59,85% dimana penelitian tersebut menghitung indeks pengungkapan laporan tahunan perusahaan manufaktur pada tahun 1999 dengan berdasarkan peraturan BAPEPAM tentang pengungkapan wajib sebanyak 77 item. Junaid (2004) menemukan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM pada tahun 2002-2004 sekitar 91,79% dengan indeks pengungkapan terendah sebesar 84%. Survey yang dilakukan oleh *World Bank* pada tahun 2007 menunjukkan Indonesia berada pada posisi 135 dari 175 negara, turun 4 peringkat dibanding tahun lalu (Diyanti, 2010). Data tersebut memberikan bukti bahwa perlu adanya perbaikan dalam tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan yang ada di Indonesia.

Terjadinya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) masih kurang, terutama

Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami, 2012). Adanya tindakan penyalahsajian laporan keuangan ini merupakan indikasi dari tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen PT. Kimia Farma (*Corporate governance*), yang ternyata tidak dapat terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan pada periode tersebut.

Kasus PT Kimia Farma, Tbk ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009 dalam Prawinandi dkk, 2012).

Adopsi peraturan pengungkapan saja tidak dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga diperlukan sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Akhtaruddin et al., 2009 dalam Prawinandi dkk., 2012).

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat

2008 dalam Prawinandi dkk, 2012), dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan. Inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI , *for Corporate Governance in*, 2001), sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris yaitu komite audit. Struktur *corporate governance* tersebut antara lain jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah anggota komite audit dan Proporsi komisaris wanita (Prawinandi dkk, 2012).

Fenomena peran dewan komisaris dalam keterlibatannya mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS semakin menarik ketika dikaitkan dengan reaksi pemilik modal yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan mereka. Selama ini pemilik modal memanfaatkan laporan keuangan dalam menganalisa prospek *return* dalam investasi sekuritas. Laporan keuangan diyakini dapat mencerminkan prospek perusahaan. Hal ini sangat umum dilakukan mengingat setiap investor tentunya tidak ingin menderita kerugian akibat salah dalam mengambil keputusan karena kurang lengkapnya informasi yang di ungkapkan pada laporan keuangan di sebuah perusahaan *go public*.

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang diantaranya Tsalavoutas et al. (2008) di Yunani; Al-Akra et al. (2010) di

Melanie T. dan Dierugian (2011) di Yunani yaitu meneliti

tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Di Indonesia sendiri penelitian tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sudah pernah dilakukan oleh Prawinandi (2012) untuk tahun penelitian 2009-2010, namun belum pernah dilakukan pada tahun 2012 dimana pada tahun tersebut konvergensi IFRS secara penuh di terapkan di Indonesia, khususnya yang meneliti pada *annual report* perusahaan manufaktur.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait topik tersebut dengan judul: **"PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS"**

. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Prawinandi (2012) dimana peneliti menggunakan variabel *corporate governance*. Indikator variabel *corporate governance* tersebut adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. Perbedaannya adalah penelitian ini mengganti objek dan tahun penelitian dari perusahaan jasa menjadi perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI untuk tahun 2012. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun 2012 Indonesia sudah menerapkan konvergensi IFRS secara penuh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Maka penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, proporsi komisaris wanita dan jumlah anggota komite audit.

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
2. Apakah proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
3. Apakah latar belakang pendidikan komisaris utama dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
4. Apakah proporsi komisaris wanita dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
5. Apakah jumlah anggota komite audit dapat mempengaruhi tingkat

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) pada perusahaan manufaktur. Sehingga berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS
2. Untuk menganalisis proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS
3. Untuk menganalisis latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS
4. Untuk menganalisis proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS
5. Untuk menganalisis jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa ekonomi dalam memahami tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS yang dipengaruhi oleh struktur corporate governance serta diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan kajian kepada manajemen perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang di keluarkan oleh manajemen perusahaannya.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor atau pemilik modal dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya dari suatu

perusahaan manufaktur untuk mengambil keputusan investasi

c. Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kreditor dalam mendapatkan informasi yang baik untuk menentukan perusahaan mana